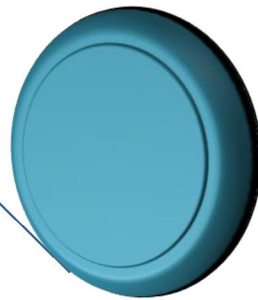




## **DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM**

# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)TAHUN 2023**

LKjIP merupakan merupakan dokumen pelaporan wajib berfungsi sebagai indikator akuntabilitas dari pelaksanaan tugas fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah penggunaan Anggaran.



# Daftar Isi

<b>Daftar Isi</b> .....	i
<b>Kata Pengantar</b> .....	iii
<b>Ringkasan Eksekutif</b> .....	v
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Maksud Dan Tujuan</b> .....	3
<b>1.3 Data Umum Organisasi</b> .....	3
<b>1.3.1 Struktur Organisasi</b> .....	4
Tabel 1.1 .....	4
Bagan Struktur Organisasi.....	4
<b>1.3.2 Tugas Pokok Dan Fungsi</b> .....	4
<b>1.3.3 Sumber Daya Manusia</b> .....	5
Tabel 1.2 .....	5
SDM Menurut Golongan.....	5
Tabel 1.3 .....	5
SDM Menurut Pendidikan .....	5
Tabel 1.4 .....	6
SDM Menurut Penempatan .....	6
<b>1.3.4 Sarana Dan Prasarana</b> .....	6
Tabel 1.5 .....	6
Sarana dan Prasarana .....	6
<b>1.3.5 Keuangan</b> .....	7
Tabel 1.6 .....	7
Keuangan .....	7
<b>1.4 Sistematika Penyajian</b> .....	8
<b>Bab II</b> .....	9
<b>PERENCANAAN KINERJA</b> .....	9
<b>2.1 Pernyataan Visi</b> .....	9
<b>2.2 Pernyataan Misi</b> .....	10
<b>2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis</b> .....	11
<b>2.4 Program Kerja</b> .....	12

<b>2.5 Indikator Kinerja Utama</b> .....	13
Tabel 2.1 .....	14
Indikator Kinerja Utama.....	14
<b>2.6 Perencanaan Kinerja</b> .....	14
Tabel 2.2.....	15
Perencanaan Kinerja .....	15
<b>2.7 Penetapan Kinerja</b> .....	17
Tabel 2.3.....	19
Penetapan Kinerja APBD 2023.....	19
Tabel 2.4.....	23
Penetapan Kinerja APBDP 2023 .....	23
<b>Bab III</b> .....	25
<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	25
<b>3.1 Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja</b> .....	26
Tabel 3.1.....	27
Pengukuran Indikator Kinerja Utama.....	27
Tabel 3.2.....	29
Pengukuran Perencanaan Kinerja .....	29
<b>3.2 Realisasi Anggaran</b> .....	36
Tabel 3.3.....	37
Serapan Anggaran Tahun 2023 .....	37
<b>Bab IV</b> .....	40
<b>DENUTUP</b> .....	40
<b>4.1 Kesimpulan</b> .....	40
<b>4.2 Rekomendasi</b> .....	41

# Kata Pengantar

**P**

uji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2023 dan sekaligus dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan kegiatan yaitu Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar.

Penyusunan dokumen ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kota Batam ini merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategisnya yang harapannya dapat dimanfaatkan untuk:

- (1) Bahan evaluasi kinerja;
- (2) Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;



(3) Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;

(4) Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Laporan ini memuat capaian kinerja yang merupakan realisasi kinerja dari target-target kinerja yang diperjanjikan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja. Pada umumnya sasaran yang direncanakan tahun 2023 dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, LKjIP juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam sebagai umpan balik/ pendorong untuk meningkatkan kinerja.

Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan LKjIP ini. Ibarat pepatah "Nobody is Perfect" maka dari itu segala kritikan untuk perbaikan LKjIP ini sangat kami hargai. Semoga Allah S.W.T tetap membimbing dan menyadarkan kita untuk selalu berkarya lebih baik lagi sehingga Visi dan Misi Pemerintah Kota Batam khususnya pada misi ketiga Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia yang turut didukung Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi bagi pembangunan Kota Batam.

Batam, 15 Februari 2024

Kepala Dinas Tenaga Kerja  
Kota Batam



Rudi Sakyakirti, SH., MH  
NIP. 19650606 199303 1 018

# Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kota Batam ini merupakan pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

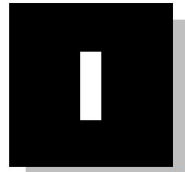
Ringkasan capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam yang dihasilkan tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Menurunnya masalah ketenagakerjaan dan berkurangnya jumlah pengangguran
  1. Menurunkan tingkat pengangguran terbuka dengan indikator persentase tingkat pengangguran terbuka, realisasi sampai akhir bulan Desember 2023 adalah menurun sebesar 1.61% dari target awal 9.75%, hal ini disebabkan banyaknya perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan dan mengadakan pelatihan berbasis kompetensi.
  2. Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan dengan indikator meningkatnya persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan, capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2023 adalah 96% masuk kategori sangat baik.
  3. Persentase pencari kerja yang bersertifikasi kompetensi, capaian kinerja sampai akhir bulan Desember 2023 adalah 100% masuk kategori sangat baik.
  4. Persentase tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi, capaian kinerja sampai akhir bulan Desember 2023 adalah 100% masuk kategori sangat baik.

5. Persentase pencari kerja yang terserap dan ditempatkan, capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2023 adalah 100% masuk kategori sangat baik.
- b. Meningkatnya Kualitas Lembaga Pelatihan dengan indikator persentase lembaga yang terakreditasi, realisasi sampai akhir bulan Desember 2023 adalah 0% tidak sesuai dengan target, dengan capaian kinerja yaitu 0% masuk kategori buruk.
- c. Meningkatkan ketenangan bekerja dan berusaha bagi pelaku proses produksi pekerja dengan indikator persentase pekerja / buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2023 adalah 100% masuk kategori sangat baik.
- d. Meningkatkan Pembinaan dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan dengan indikator persentase perusahaan yang melaksanakan peraturan ketenagakerjaan, capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2023 adalah 100% masuk kategori sangat baik, yaitu terealisasi 29.64% dari target 25%.
- e. Mengusahakan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan peningkatan sarana dan prasarana
1. Persentase tersedianya pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran, capaian kinerja sampai bulan Desember 2023 adalah 100%, termasuk kategori sangat baik.
  2. Persentase tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran, capaian kinerja sampai bulan Desember 2023 adalah 100%, termasuk kategori sangat baik.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam di masa yang akan datang. Pertama masih adanya kesempatan kerja yang

tidak bisa terisi karena tidak sesuainya kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia industri, kedua belum maksimalnya laporan lowongan kerja yang diterima dan masih terbatasnya kesempatan kerja disektor formal, ketiga hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai acuan bagi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.



# Bab I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang



alam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, maka perlu adanya pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir tahun anggaran. Dalam dunia birokrasi, Akuntabilitas Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan instansi yang bersangkutan.

Mengacu pada Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Batam tahun 2023 merupakan wujud Akuntabilitas dan Transparansi pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2023 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023. Penyusunan LKjIP



Dinas Tenaga Kerja 2023 ini pada dasarnya merupakan kewajiban yang menjadi keharusan Instansi Pemerintah dalam memberikan penjelasan secara tertulis mengenai pertanggungjawaban terhadap Kinerja / Realisasi yang telah dilakukan selama tahun 2023. Penyusunan LKjIP Dinas Tenaga Kerja tahun 2023 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai Akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2023.

LKjIP tahun 2023 merupakan bagian dari informasi Pengukuran Kinerja dalam melaksanakan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja tahun 2021-2026, adalah dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

Target kinerja yang harus dicapai Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021 - 2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong Instansi Pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Sebagai bagian dari unsur penyelenggara Pemerintah Kota Batam, Dinas Tenaga Kerja dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik baik yang bersifat teknis maupun non teknis harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu Dinas Tenaga Kerja memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada tahun 2023.



## **1.2 Maksud Dan Tujuan**

Maksud penyusunan LKjIP tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja Kota Batam adalah sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Pemerintah Kota Batam khususnya pada misi ketiga yaitu Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia yang turut didukung oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Sehingga LKjIP ini dijadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Organisasi.

Tujuan penyusunan LKjIP Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2023 adalah bertujuan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Sehingga diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKjIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang agar pencapaian program dan kebijakan dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun.

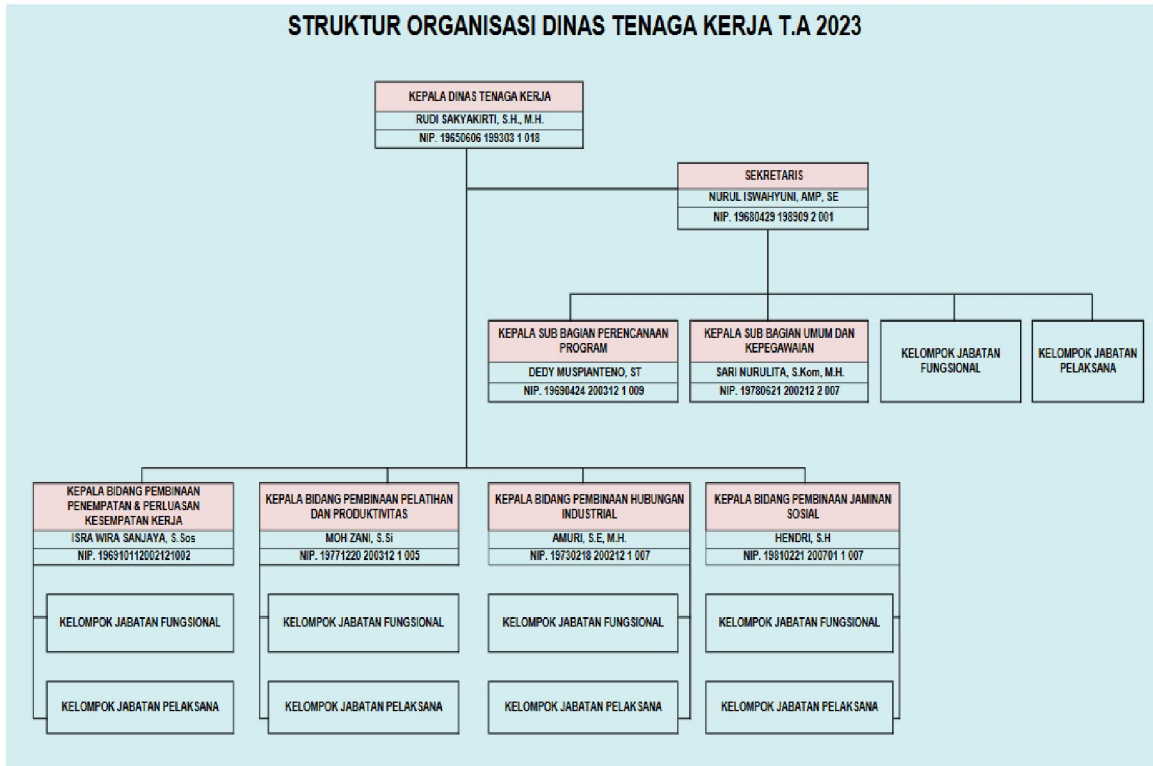
## **1.3 Data Umum Organisasi**

Kelembagaan dalam organisasi menjadi faktor utama dalam menentukan untuk mencapai keberhasilan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. Kelembagaan menyangkut aspek organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai.

### 1.3.1 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Bagan Struktur Organisasi**



### 1.3.2 Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Ketenagakerjaan sesuai dengan kewenangannya. Dalam pelaksanaan tugas pokok, Kepala Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

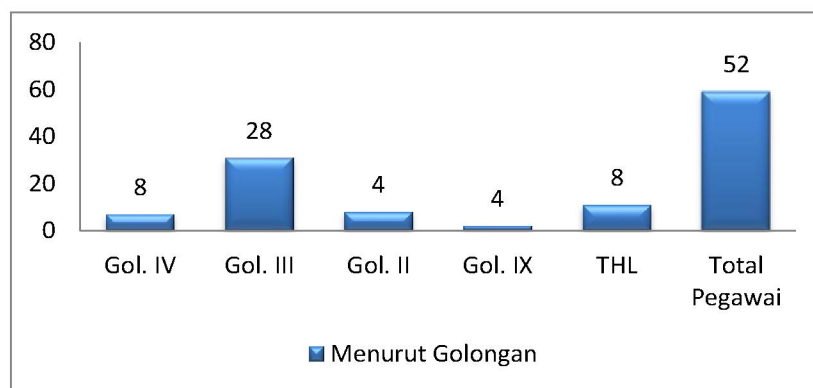
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketenagakerjaan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang ketenagakerjaan; dan
4. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan dinas.

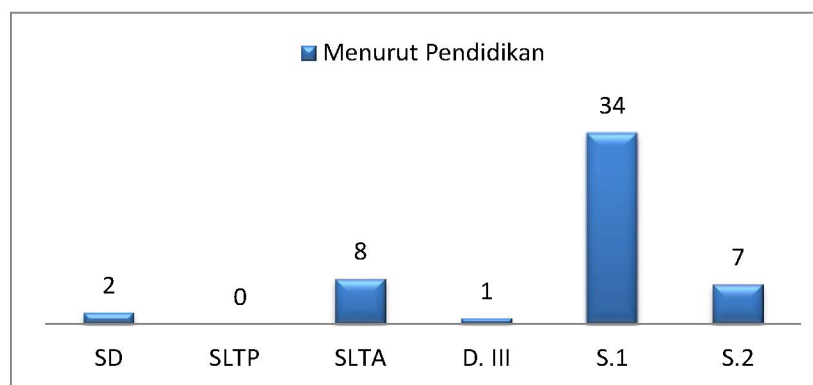
### 1.3.3 Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam didukung oleh personel / Sumber Daya Manusia sebanyak 52 (lima puluh dua) orang, terinci sebagai berikut:

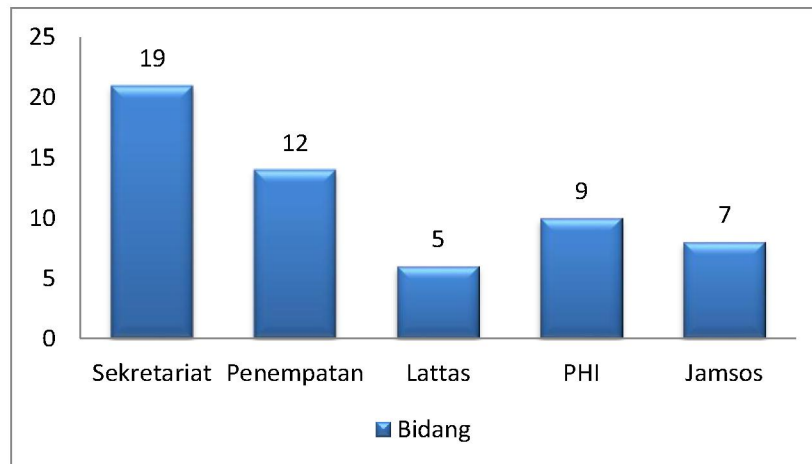
**Tabel 1.2**  
**SDM Menurut Golongan**



**Tabel 1.3**  
**SDM Menurut Pendidikan**



**Tabel 1.4**  
**SDM Menurut Penempatan**



### **1.3.4 Sarana Dan Prasarana**

Sarana dan prasarana (Barang Milik / Kekayaan Daerah = BM/KD) Dinas Tenaga Kerja Kota Batam per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

**Tabel 1.5**  
**Sarana dan Prasarana**

NO.	URAIAN	SATUAN	NILAI (Rp)
1.	Tanah	2,034 m <sup>2</sup> (Kantor) 300 m <sup>2</sup> (Rumah Dinas)	1.744.300.265,51
2.	Gedung dan Bangunan	5 item	2.322.240.244,71
3.	Peralatan dan Mesin	346 buah	3.209.727.000,00
4.	Kendaraan roda 4	5 unit	1.170.800.000

### 1.3.5 Keuangan

Anggaran dan Realisasi Keuangan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam tahun 2023 terinci sebagai berikut:

**Tabel 1.6**  
**Keuangan**

NO.	JENIS BELANJA	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	SISA DPPA (RP)	%
<b>BELANJA DAERAH</b>					
1.	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>29.713.342.326</b>	<b>21.471.623.990</b>	<b>8.241.718.336</b>	<b>72.26</b>
	Belanja Pegawai	8.858.098.558	8.408.161.500	449.937.058	94.92
	Belanja Barang & Jasa	20.855.243.768	13.063.462.490	7.791.781.278	62.63
2.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>499.093.499</b>	<b>473.365.493</b>	<b>25.728.006</b>	<b>94.84</b>
	Belanja Modal Peralatan & Mesin	270.721.500	255.510.000	15.211.500	94.38
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	228.371.999	217.855.493	10.516.506	95.39
<b>JUMLAH</b>		<b>30.212.435.825</b>	<b>21.944.989.483</b>	<b>8.267.446.342</b>	<b>72.63</b>

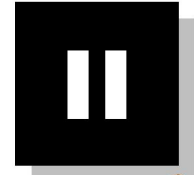
## 1.4 Sistematika Penyajian

Dalam laporan akuntabilitas ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2023. Strategis disini dimaksudkan kegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam.

Laporan akuntabilitas kinerja ini terdiri dari 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

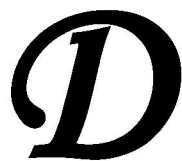
- BAB I :** Pendahuluan, Menguraikan tentang : Gambaran Umum Organisasi, Aspek Strategis Organisasi, Dan Sistematika Penyajian
- BAB II :** Perencanaan Dan Penetapan Kinerja
- BAB III :** Akuntabilitas Kinerja Menguraikan Tentang : Pengukuran Kinerja, Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja, Serta Akuntabilitas Keuangan
- BAB IV :** Penutup Menguraikan Tentang Tinjauan Secara Umum Terhadap Kinerja Yang Telah Dicapai Termasuk Upaya Strategis Untuk Meningkatkan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Di Tahun Mendatang (Years To Years)





## Bab II

# PERENCANAAN KINERJA



alam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Rencana Strategis merupakan langkah yang harus dilakukan instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan strategi organisasi. Sebagai instansi yang mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam penanganan bidang Ketenagakerjaan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, tujuan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2021-2026, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam sesuai tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan Perencanaan Kinerja yang berorientasi hasil yang ingin dicapai dalam 5 tahun kedepan. Perencanaan tersebut meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dalam tahun 2023 telah ditetapkan rencana dan target kinerja.

### 2.1 Pernyataan Visi

Visi merupakan tujuan akhir dari keinginan yang dapat menggambarkan atau memberikan cita dan citra yang ingin diwujudkan dan sekaligus memotivasi dan memberi semangat yang senantiasa mewarnai pola pikir dan langkah dalam mengelola keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Dinas Tenaga Kerja Kota Batam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Batam periode 2021-2026. Visi Kota Batam tersebut adalah *"Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera"*.

## 2.2 Pernyataan Misi

Misi merupakan suatu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan secara maksimal, yang mencerminkan pandangan organisasi tentang kemampuannya dalam mencapai visi yang telah ditetapkan.

Adapun Misi Pemerintah Kota Batam dibagi atas 5 (lima) pernyataan misi dalam rangka mewujudkan visi dimaksud, sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah.
- 2) Mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan didukung infrastruktur, utilitas dan sistem transportasi yang maju, ramah, aman, asri dan nyaman sesuai tata ruang.
- 3) Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berbudaya, produktif dan berakhlak mulia.
- 4) Melanjutkan percepatan pembangunan di daerah hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam.
- 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dari misi tersebut dalam pelaksanaannya yang terkait dengan ketenagakerjaan adalah Misi ke – 3 yaitu :

*Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia, dengan tujuan mewujudkan pembangunan manusia yang unggul dan bertakwa menuju masyarakat yang adil dan sejahtera, dengan sasaran yaitu Menurunnya angka pengangguran.*

Dinas Tenaga Kerja Kota Batam harus mampu menjadi motivator dan tauladan serta sebagai transformator dalam mewujudkan kebijaksanaan Wali Kota Batam serta terciptanya tenaga kerja yang berdaya saing, berbudaya,

produktif dan berakhlak mulia, melalui program Pembangunan Kota Batam Tahun 2021 – 2026.

Dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi dan juga tercapainya prioritas program kerja Wali Kota yaitu Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam berupaya menuangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Adapun dukungan program tersebut yaitu Pelatihan Kerja & Produktivitas Tenaga Kerja dan Program Penempatan Kerja yang diperkuat dengan Program Hubungan Industrial demi terciptanya ketenangan berusaha. Diharapkan melalui dukungan program ini dapat meningkatkan penyerapan Tenaga Kerja di Kota Batam demi pengurangan tingkat pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis**

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit daripada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan lebih jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa datang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik berdasarkan atas visi dan misi yang telah dijelaskan sebelumnya.

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam pada 5 (lima) tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan Visi dan Misi Pemerintah Kota Batam, dan Sasaran Strategis Kementerian Tenaga Kerja yaitu :

1. Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel.
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan perumusan tujuan strategis diatas, maka dirumuskan sasaran strategis searah dengan tujuan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Perumusan sasaran strategis yang mengacu pada tujuan strategis dapat dirinci sebagai berikut:

1. Mewujudkan tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel. Dalam rangka mewujudkan tujuan ini, maka sasaran strategisnya adalah:
  - 1) Menurunnya masalah ketenagakerjaan dan berkurangnya jumlah pengangguran
    - i) Menurunnya persentase tingkat pengangguran terbuka
    - ii) Meningkatnya persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan
    - iii) Meningkatnya persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
    - iv) Meningkatnya persentase pencari kerja yang terserap dan ditempatkan
    - v) Meningkatnya persentase data dan informasi perencanaan tenaga kerja yang disajikan
  - 2) Meningkatnya kualitas lembaga pelatihan
  - 3) Meningkatnya kualitas perangkat hubungan industrial dan perbaikan iklim ketenagakerjaan
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam rangka mewujudkan tujuan ini, maka sasaran strategisnya adalah:
  - Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dengan sarana dan prasarana perkantoran yang terpelihara.

## **2.4 Program Kerja**

Program Kerja merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh suatu organisasi. Program Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota



Program ini dimaksudkan untuk peningkatan penyediaan sarana administrasi perkantoran guna menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, kegiatan ini bersifat rutinitas kantor.

2. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini dimaksudkan untuk peningkatan penyediaan data dan informasi Perencanaan Tenaga Kerja dalam bentuk dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro.

3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini dimaksudkan untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan meningkatkan kualitas dan produktivitas angkatan kerja.

4. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini dimaksudkan untuk meningkatnya persentase tenaga kerja yang terserap / ditempatkan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan terciptanya perluasan kesempatan kerja.

5. Program Hubungan Industrial

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan penyelesaian perselisihan pengusaha pekerja dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja

## **2.5 Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian /Lembaga / Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi.

Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output).

Indikator Kinerja Program (Outcome) berdasarkan sasaran strategis RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 adalah Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan target capaian tahun 2023 adalah 9.75%. Berdasarkan Berita Resmi Statistik yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam tanggal 22 Desember 2023, Struktur Ketenagakerjaan Kota Batam pada Bulan Agustus 2023 Angkatan Kerja / Penduduk Usia Kerja (usia diatas 15 tahun) yaitu 921.425 jiwa, yang terdiri dari 589.402 jiwa penduduk bekerja dan 52.203 jiwa penduduk pengangguran dengan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8.14%, yang berarti target tercapai.

Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Indikator Kinerja Utama**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menurunnya masalah ketenagakerjaan dan berkurangnya jumlah pengangguran	Persentase Tingkat pengangguran terbuka	9.75%
		Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan	97%
		Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	16.38%
		Persentase Pencari Kerja yang terserap dan ditempatkan	51%
		Persentase data dan informasi perencanaan tenaga kerja yang disajikan dalam buku	-

## 2.6 Perencanaan Kinerja

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam untuk Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan program kegiatan dengan sumber dana dari APBD Kota Batam sebesar **Rp 27.680.001.400,-** (Dua puluh



tujuh milyar enam ratus delapan puluh juta seribu empat ratus rupiah) kemudian pada APBDP 2023 mengalami penambahan dana menjadi **Rp 30.212.435.825,-** (Tiga puluh milyar dua ratus dua belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) guna melaksanakan sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja Kota Batam tahun 2021 - 2026 yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam tahun 2021 - 2026. Adapun sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang direncanakan dalam tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 2.2**  
**Perencanaan Kinerja**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Menurunnya masalah ketenagakerjaan dan berkurangnya jumlah pengangguran	Persentase Tingkat pengangguran terbuka	9.75%	-
		Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan	97%	-
		Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	16.38%	<b>Program:</b> PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA  <b>Kegiatan:</b> 1. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi 2. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Persentase Pencari Kerja yang terserap dan ditempatkan	51%	<b>Program:</b> PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA  <b>Kegiatan:</b> 1. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten / Kota 2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 3. Perlindungan PMI (Pra dan

				Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota 4. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota
		Persentase data dan informasi perencanaan tenaga kerja yang disajikan dalam buku	-	<b>Program:</b> PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA  <b>Kegiatan :</b> 1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja
2.	Meningkatnya kualitas lembaga pelatihan	Persentase Lembaga yang terakreditasi	14%	<b>Program:</b> PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA  <b>Kegiatan:</b> 1. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
3.	Meningkatnya kualitas perangkat hubungan industrial dan perbaikan iklim ketenagakerjaan	Persentase pekerja / buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	90%	<b>Program:</b> PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL  <b>Kegiatan:</b> 1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota
		Persentase perusahaan yang melaksanakan peraturan ketenagakerjaan	25%	<b>Program:</b> PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL  <b>Kegiatan:</b> 1. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
4.	Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase tersedianya pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	<b>Program:</b> PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA  <b>Kegiatan:</b>

				<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</li> <li>2. Administrasi Umum Perangkat Daerah</li> <li>3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> </ol>
		Persentase tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran	100%	<p><b>Program :</b> PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</p> <p><b>Kegiatan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</li> <li>2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> </ol>
5.	Meningkatnya ketepatan pengelolaan anggaran yang optimal	Persentase Realisasi Anggaran Dinas	100%	<p><b>Program :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</li> <li>2. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</li> <li>3. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</li> <li>4. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</li> <li>5. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</li> </ol>

## 2.7 Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Agar supaya pencapaian indikator kinerja berjalan dengan baik sebagaimana yang direncanakan perlu suatu komitmen bersama antara pimpinan OPD (Kepala Dinas) dengan Wali Kota Batam dalam suatu Penetapan Kinerja sebagaimana Tabel 2.3 sebagai berikut:



**Tabel 2.3**  
**Penetapan Kinerja APBD 2023**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Menurunnya masalah ketenagakerjaan dan berkurangnya jumlah pengangguran	Persentase Tingkat pengangguran terbuka	9.75%	-	:
		Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan	97%	:	:
		Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	16.38%	<b>Program:</b> PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA  <b>Kegiatan :</b> 1. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi 2. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<b>Rp... 7.401.506.337,00.-</b>  <b>Rp... 7.388.647.680,00.-</b>
		Persentase Pencari Kerja yang terserap dan ditempatkan	51%	<b>Program:</b> PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA  <b>Kegiatan:</b> 1. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten / Kota 2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 3. Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota 4. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	<b>Rp... 82.272.000,00.-</b> <b>Rp... 86.572.000,00.-</b> <b>Rp... 68.963.000,00.-</b> <b>Rp... 76.274.000,00.-</b>

		Persentase data dan informasi perencanaan tenaga kerja yang disajikan dalam buku	-	<b>Program:</b> PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA  <b>Kegiatan:</b> 1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	Rp. 0,00.-
2.	Meningkatnya kualitas lembaga pelatihan	Persentase Lembaga yang terakreditasi	14%	<b>Program:</b> PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA  <b>Kegiatan:</b> 1. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rp. 198.000.000,00.-
3.	Meningkatnya kualitas perangkat hubungan industrial dan perbaikan iklim ketenagakerjaan	Persentase pekerja / buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	90%	<b>Program:</b> PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL  <b>Kegiatan:</b> 1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 160.106.000,00.-
		Persentase perusahaan yang melaksanakan peraturan ketenagakerjaan	25%	<b>Program:</b> PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL  <b>Kegiatan:</b> 1. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 89.015.000,00.-



4.	Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase tersedianya pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	<b>Program:</b> PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA  <b>Kegiatan:</b> 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Rp... 9.675.324.833,00.-</b>  <b>Rp... 682.589.750,00.-</b>  <b>Rp... 759.130.800,00.-</b>
		Persentase tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran	100%	<b>Program .:</b> PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA  <b>Kegiatan:</b> 1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Rp... 258.780.000,00.-</b>  <b>Rp... 614.220.000,00.-</b>
5.	Meningkatnya ketepatan pengelolaan anggaran yang optimal	Persentase Realisasi Anggaran Dinas	100%	<b>Program .:</b> 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA 2. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 3. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA	<b>Rp... 11.990.045.383,00.-</b>  <b>Rp... 00.-</b>  <b>Rp... 15.126.754.017,00.-</b>

				KERJA	
				4. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rp. 314.081.000,00.-
				5. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rp. 249.121.000,00.-
<b>Jumlah</b>					<b>Rp. 27.680.001.400,00.-</b>

**Tabel 2.4**  
**Penetapan Kinerja APBDP 2023**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Menurunnya masalah ketenagakerjaan dan berkurangnya jumlah pengangguran	<b>Persentase Tingkat pengangguran terbuka</b>	<b>9.75%</b>	-	:
		<b>Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan</b>	<b>97%</b>	:	:
		<b>Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi</b>	<b>16.38%</b>	<b>Program :</b> <b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b> <b>Kegiatan :</b> 1. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi 2. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<b>Rp... 10.775.850.637,00.-</b> <b>Rp... 7.524.842.680,00.-</b>
		<b>Persentase Pencari Kerja yang terserap dan ditempatkan</b>	<b>51%</b>	<b>Program:</b> <b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b> <b>Kegiatan:</b> 1. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten / Kota 2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota 3. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	<b>Rp... 82.272.000,00.-</b> <b>Rp... 86.572.000,00.-</b> <b>Rp... 123.099.000,00.-</b> <b>Rp... 0,00.-</b>

		Persentase data dan informasi perencanaan tenaga kerja yang disajikan dalam buku	-	<b>Program:</b> <b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>  <b>Kegiatan:</b> 1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	Rp... 0,00.-
2.	Meningkatnya kualitas lembaga pelatihan	Persentase Lembaga yang terakreditasi	14%	<b>Program:</b> <b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>  <b>Kegiatan:</b> 1. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rp... 198.000.000,00.-
3.	Meningkatnya kualitas perangkat hubungan industrial dan perbaikan iklim ketenagakerjaan	Persentase pekerja / buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	90%	<b>Program:</b> <b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>  <b>Kegiatan:</b> 2. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Rp... 169.706.000,00.-
		Persentase perusahaan yang melaksanakan peraturan ketenagakerjaan	25%	<b>Program:</b> <b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>  <b>Kegiatan:</b> 1. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Rp... 89.015.000,00.-

4.	Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase tersedianya pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	<b>Program:</b> <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	
				<b>Kegiatan:</b> 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Rp... 8.867.098.558,00.-</b>  <b>Rp... 549.027.750,00.-</b>  <b>Rp... 724.663.701,00.-</b>
		Persentase tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran	100%	<b>Program:</b> <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	
				<b>Kegiatan:</b> 1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Rp... 270.721.500,00.-</b>  <b>Rp... 751.566.999,00.-</b>
5.	Meningkatnya ketepatan pengelolaan anggaran yang optimal	Persentase Realisasi Anggaran Dinas	100%	<b>Program :</b> 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA 2. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 3. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA	<b>Rp... 11.163.078.508,00.-</b>  <b>Rp... 00.-</b>  <b>Rp... 18.498.693.317,00.-</b>



				KERJA	
				4. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rp. 291.943.000,00.-
				5. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rp. 258.721.000,00.-
<b>Jumlah</b>					<b>Rp. 30.212.435.825,00.-</b>



## Bab III

# AKUNTABILITAS KINERJA

**A**kuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah upaya untuk meneguhkan komitmen pemerintah dalam proses penyelenggaraan negara yang baik (good governance) dan akuntabel. LKjIP Dinas Tenaga Kerja Kota Batam disusun sebagai komitmen dan upaya untuk selalu mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan Pemerintah Kota Batam khususnya di Bidang Ketenagakerjaan sebagai organisasi pemerintah yang akuntabel. Implementasi SAKIP atau manajemen kinerja yang baik tidak terlepas dari fungsi pengendalian yang dilakukan melalui evaluasi kinerja dengan melakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui capaian hasil sehingga dapat dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam proses pengukuran capaian hasil tentunya dibarengi dengan peninjauan terhadap proses yang dilakukan untuk mencapai hasil tersebut, yang nantinya berguna untuk melakukan berbagai perbaikan-perbaikan yang diperlukan guna penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja.

### **3.1 Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja**

Dinas Tenaga Kerja telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu kepada penetapan kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengukuran data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Adapun hasil pengukuran kinerja yang telah dicapai Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023 sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

**Tabel 3.1**  
**Pengukuran Indikator Kinerja Utama**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	
1	Menurunnya masalah ketenagakerjaan dan berkurangnya jumlah pengangguran	Persentase tingkat pengangguran terbuka	11%	11,64%	10%	9,56%	9.75%	8.14%
		Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan	95%	94,50%	97%	81,38%	97%	96%
		Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100%	100%	15,21%	13,34%	16.38%	25.33%
		Persentase Pencari Kerja yang terserap dan ditempatkan	72%	59,04%	50%	28,68%	51%	51%
		Persentase data dan informasi perencanaan tenaga kerja yang disajikan dalam buku	-	-	100%	100%	-	-

Dari tabel diatas menunjukkan pencapaian kinerja utama Dinas Tenaga Kerja tahun 2023 adalah 8.14% persen dari target yang ditetapkan yaitu 9.75%, dengan hasil sangat baik. Keberhasilan pada sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sasaran yaitu persentase tingkat pengangguran terbuka. Merilis dari angka TPT yang dikeluarkan oleh BPS Kota Batam tanggal 22 Desember 2023, TPT Kota Batam dalam 5 tahun terakhir menunjukkan fluktuasi naik turun persen poin. TPT tahun 2019 adalah 8,31%, lebih tinggi dari tahun 2023 ini yaitu sebesar 8.14%, namun meningkat tajam pada saat pandemi, mencapai 11,79% tahun 2020 dan 11,64% pada tahun 2021, dimana saat itu banyak perusahaan yang tutup, mengurangi / merumahkan karyawan dan tidak membuka lowongan, yang menjadi salah satu penyebab tingginya angka pengangguran terbuka di Kota Batam, dan membaik pada periode tahun 2023 ini seiring dengan membaiknya penanggulangan wabah Covid 19 dan iklim investasi.

Mengingat tujuan jangka menengah pada Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Batam tahun 2021-2026 adalah meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Kota Batam dengan indikator kinerja tujuan yaitu *Tingkat Pengangguran Terbuka*, sasaran yang ingin dicapai dalam mendukung tujuan jangka menengah Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dalam kurun waktu tersebut sebagai berikut:

- Menurunnya masalah ketenagakerjaan dan berkurangnya jumlah pengangguran dengan indikator kinerja sasaran (ultimate outcome) yaitu:
  - Persentase penurunan jumlah pengangguran
  - Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah tersebut, strategi dan arah kebijakan harus dirumuskan secara komprehensif, sinkron, konsisten dan selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut disajikan pada tabel Pengukuran Perencanaan Kinerja Sasaran:



**Tabel 3.2**  
**Pengukuran Perencanaan Kinerja**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI	% (REALISASI /TARGET)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Menurunnya masalah ketenagakerjaan dan berkurangnya jumlah pengangguran	Persentase Tingkat pengangguran terbuka	9.75%	-	8.14%	8.14%	Target Indikator Kinerja Utama Disnaker yaitu menurunkan persentase TPT Tahun 2023 ini tercapai.
		Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan	97%	∞	96%	98.97%	Keberhasilan ini dikarenakan upaya preventif melalui pembinaan hubungan industrial kepada pihak perusahaan dan pekerja yang berselisih dan meningkatnya kualitas proses mediasi.
		Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	16.38%	<b>Program:</b> PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA  <b>Kegiatan:</b> 1. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi 1. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.33%	154.64%	Keberhasilan ini karena besarnya antusias pencari kerja dan tenaga kerja dalam meningkatkan dan memaksimalkan produktivitasnya, untuk memenuhi standar kompetensi yang berdaya saing dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
		Persentase Pencari Kerja yang terserap dan	51%	<b>Program:</b> PROGRAM	51%	100%	Termasuk kategori sangat baik, tetapi diharapkan dengan pengelolaan informasi pasar kerja

		ditempatkan		<b>PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>  <b>Kegiatan:</b> 1. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten / Kota 2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 3. Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota 4. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			dan penyebarluasan informasi tentang lowongan kerja melalui mekanisme layanan antar kerja dapat meningkatkan penempatan dan perluasan kesempatan kerja lagi.
		Persentase data dan informasi perencanaan tenaga kerja yang disajikan dalam buku	0%	<b>Program:</b> PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA  <b>Kegiatan:</b> 1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	0%	0%	Tidak ada pencapaian pada indikator kinerja pada tahun ini dikarenakan kegiatan pada program ini sudah dilaksana pada tahun 2022 dan hanya sekali dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun.
2.	Meningkatnya kualitas lembaga pelatihan	Persentase Lembaga yang terakreditasi	14%	<b>Program:</b> PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	0%	0%	Tidak ada realisasi pada pencapaian indikator ini dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran.

				<b>Kegiatan:</b> 1. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			
3.	Meningkatnya kualitas perangkat hubungan industrial dan perbaikan iklim ketenagakerjaan	Persentase pekerja / buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	90%	<b>Program:</b> PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL  <b>Kegiatan :</b> 1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	90%	100%	Termasuk kategori sangat baik dikarenakan upaya pembinaan kepada perusahaan dan pekerja secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.
		Persentase perusahaan yang melaksanakan peraturan ketenagakerjaan	25%	<b>Program:</b> PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL  <b>Kegiatan:</b> 1. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	29.64%	118.56%	Termasuk kategori cukup baik. Keberhasilan ini dikarenakan upaya pembinaan antara perusahaan dan pekerja secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan.
4.	Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan perangkat	Persentase tersedianya pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	<b>Program:</b> PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	100%	100%	Sebagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang pakai habis untuk

	daerah			DAERAH KABUPATEN / KOTA  <b>Kegiatan:</b> 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			kegiatan kantor, belanja perjalanan dinas, dan lain-lain. Capaian dari kegiatan ini sangat baik yaitu 100%.
		Persentase tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran	100%	<b>Program:</b> PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA  <b>Kegiatan:</b> 1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	Sebagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur. Pada kegiatan ini telah dilakukan pemeliharaan berupa belanja barang pakai habis, belanja jasa kantor, belanja pemeliharaan gedung, peralatan dan mesin lainnya. Capaian dari kegiatan ini sangat baik yaitu 100%.
5.	Meningkatnya ketepatan pengelolaan anggaran yang optimal	Persentase Realisasi Anggaran Dinas	100%	<b>Program :</b> 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	96.93%	96.93%	Capaian program sudah memenuhi kategori sangat baik.



				2. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			
				3. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
				4. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
				5. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			



Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Capaian sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran: Menurunnya masalah ketenagakerjaan dan berkurangnya jumlah pengangguran

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 5 (lima) indikator kinerja sasaran yaitu :

i) Persentase tingkat pengangguran terbuka

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sasaran yaitu persentase tingkat pengangguran terbuka. Target tahun ini adalah 9.75% dengan realisasi 8.14% tercapai dengan baik.

ii) Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan

Capaian indikator kinerja ini masuk kategori baik yaitu sebesar 98.97%, dari target 97% terealisasi 96%. Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator ini adalah kesadaran dari pengusaha memaksimalkan proses mediasi untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, seperti masih adanya pengusaha yang tidak datang untuk menghadiri mediasi walaupun sudah mendapatkan panggilan mediasi sebanyak tiga kali.

iii) Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

Capaian indikator kinerja sasaran ini masuk kategori baik yaitu sebesar 25.33%. Untuk mencapai sasaran ini didukung oleh:

Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi. Target kinerja untuk kegiatan ini ditetapkan sebesar 1024 orang jumlah pencari kerja yang dilatih dan realisasi capaian adalah sebesar 1024 orang sehingga capaiannya adalah 100%.

Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Target kinerja untuk kegiatan ini ditetapkan sebesar 686 orang jumlah tenaga kerja yang dilatih dan realisasi capaian adalah sebesar 686 orang sehingga capaiannya adalah 100%.

iv) Persentase pencari kerja yang terserap dan ditempatkan

Capaian indikator persentase pencari kerja yang terserap dan ditempatkan pada tahun 2023 ini masuk kategori sangat baik yaitu 51%, dan diharapkan kedepannya melalui kegiatan yang dilaksanakan untuk memperluas informasi pasar kerja dan meningkatkan layanan antar kerja seperti pelaksanaan kegiatan Job Fair / Bursa Kerja maupun Karir Hub bisa menjadi pemicu meningkatnya lapangan pekerjaan dan meluasnya kesempatan kerja.

v) Persentase data dan informasi perencanaan tenaga kerja yang disajikan dalam buku.

Tidak ada capaian pada indikator persentase ini, tetapi nantinya diharapkan dapat dijadikan acuan dalam menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan di Kota Batam.

2. Sasaran: Meningkatnya kualitas lembaga pelatihan

Tidak ada realisasi pada pencapaian indikator ini dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran tahun 2023. Target kinerja untuk kegiatan ini ditetapkan sebesar 10 LPK yang dibina sehingga terget tidak tercapai.

3. Sasaran: Meningkatnya kualitas perangkat hubungan industrial dan perbaikan iklim ketenagakerjaan

i) Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan

Capaian indikator kinerja sasaran ini masuk kategori sangat baik yaitu sebesar 90%, diharapkan dengan meningkatnya kesejahteraan pekerja dapat meningkatkan produktivitas bekerja dan ketenangan berusaha.

Kegiatan pendukung indikator ini adalah Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah Kabupaten /

Kota dengan target kinerja yaitu jumlah data dan informasi Sarana HI 10 Laporan dan tercapai 100%.

- ii) Persentase Perusahaan yang melaksanakan Peraturan Ketenagakerjaan

Kegiatan pendukung indikator ini yaitu Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di daerah Kabupaten / Kota. Target kinerja kegiatan ini adalah jumlah LKS Tripartit yang dibina dalam setahun dan terealisasi 10 kali pelaksanaan rapat operasional kegiatan, sehingga capaiannya adalah 100%.

4. Sasaran: Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan Perangkat Daerah

- i) Persentase Tersedianya Pelayanan Kebutuhan Administrasi Perkantoran

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sasaran yaitu tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Kegiatan pendukung indikator ini yaitu :

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sebagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang pakai habis untuk kegiatan kantor, belanja perjalanan dinas, dan lain-lain. Capaian dari kegiatan ini sangat baik yaitu 100%.

- ii) Persentase tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sasaran yaitu tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran. Kegiatan pendukung indikator ini yaitu :

- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Sebagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan

sarana dan prasarana aparatur. Pada kegiatan ini telah dilakukan belanja modal alat kantor dan rumah tangga.

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Sebagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur. Pada kegiatan ini telah dilakukan pemeliharaan berupa belanja barang pakai habis, belanja jasa kantor, belanja pemeliharaan gedung, peralatan dan mesin lainnya.

Capaian dari kegiatan ini sangat baik yaitu 100%.

5. Sasaran: Meningkatnya ketepatan pengelolaan anggaran yang optimal

i) Persentase Realisasi Anggaran Dinas

Capaian indikator kinerja sasaran ini masuk kategori sangat baik yaitu sebesar 96.93%.

### **3.2 Realisasi Anggaran**

Pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam tahun anggaran 2023 sebagai upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud dengan adanya dukungan dana sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam sebesar Rp. 27.680.001.400,- baik yang dialokasikan dalam anggaran belanja operasi maupun belanja modal.

Penyusunan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Secara umum serapan anggaran Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023 sudah baik, dimana dari total 14 kegiatan dan 22 sub kegiatan terdapat 19 sub kegiatan yang pencapaiannya sangat baik yaitu diatas 91%, 19 subkegiatan dengan



rentang nilai 80% - 91% dan ada 3 sub kegiatan yang pencapaiannya dibawah 80%.

Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) untuk Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun Anggaran 2023 yang telah dikelola seluruhnya sebesar:

- **Rp 27.680.001.400,-** (Dua puluh tujuh milyar enam ratus delapan puluh juta seribu empat ratus rupiah), sedangkan realisasi sebesar : 77.21%
- **Rp 30.212.435.825,-** (Tiga puluh milyar dua ratus dua belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) 96.93%.

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Tenaga Kerja Kota Batam mendapatkan alokasi anggaran yang dikelola sebagaimana tertuang pada tabel 3.3 berikut ini.

**Tabel 3.3**  
**Serapan Anggaran Tahun 2023**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU		REALISASI KEUANGAN	%
		MURNI	PERUBAHAN		
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<b>11.990.045.383,00</b>	<b>11.163.078.508,00</b>	<b>10.473.233.981,00</b>	<b>93,82%</b>
1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.675.324.833,00</b>	<b>8.867.098.558,00</b>	<b>8.408.161.500,00</b>	<b>94,82%</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.593.964.833,00	8.785.738.558,00	8.326.801.500,00	94,78%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	81.360.000,00	81.360.000,00	81.360.000,00	100%
2	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>682.589.750,00</b>	<b>549.027.750,00</b>	<b>519.003.475,00</b>	<b>94,53%</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.621.000,00	5.870.000,00	5.728.000,00	97,58%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	175.649.250,00	196.674.250,00	172.769.783,00	87,85%



	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	108.943.500,00	108.943.500,00	105.580.500,00	96,91%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	3.600.000,00	3.600.000,00	3.000.000,00	83,33%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	388.776.000,00	233.940.000,00	231.925.192,00	99,14%
<b>3</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>258.780.000,00</b>	<b>270.721.500,00</b>	<b>255.510.000,00</b>	<b>94,38%</b>
	Pengadaan Mebel	0	0	0	0%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	258.780.000,00	270.721.500,00	<b>255.510.000,00</b>	94,38%
<b>4</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>759.130.800,00</b>	<b>724.663.701,00</b>	<b>624.544.413,00</b>	<b>86,18%</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	284.961.600,00	251.428.701,00	192.773.777,00	76,67%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	474.169.200,00	473.235.000,00	431.770.636,00	91,24%
<b>5</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>614.220.000,00</b>	<b>751.566.999,00</b>	<b>666.014.593,00</b>	<b>88,62%</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	178.510.000,00	221.010.000,00	201.820.100,00	91,32%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	140.410.000,00	140.410.000,00	108.895.000,00	77,56%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	295.300.000,00	390.146.999,00	355.299.493,00	91,07%
<b>II</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>6</b>	<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	0	0	0	0%
<b>III</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>15.126.754.017,00</b>	<b>18.498.693.317,00</b>	<b>18.324.716.475,00</b>	<b>99,06%</b>
<b>7</b>	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>7.401.506.337,00</b>	<b>10.775.850.637,00</b>	<b>10.676.713.500,00</b>	<b>99,08%</b>
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	7.401.506.337,00	10.775.850.637,00	10.676.713.500,00	99,08%
<b>8</b>	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>336.600.000,00</b>	<b>198.000.000,00</b>	<b>193.500.000,00</b>	<b>97,73%</b>

	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	336.600.000,00	198.000.000,00	193.500.000,00	97,73%
<b>9</b>	<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>7.388.647.680,00</b>	<b>7.524.842.680,00</b>	<b>7.454.502.975,00</b>	<b>99,07%</b>
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	7.388.647.680,00	7.524.842.680,00	7.454.502.975,00	99,07%
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>314.081.000,00</b>	<b>291.943.000,00</b>	<b>239.735.008,00</b>	<b>82,12%</b>
<b>10</b>	<b>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>82.272.000,00</b>	<b>82.272.000,00</b>	<b>76.183.748,00</b>	<b>92,60%</b>
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	82.272.000,00	82.272.000,00	76.183.748,00	92,60%
<b>11</b>	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>86.572.000,00</b>	<b>86.572.000,00</b>	<b>85.288.000,00</b>	<b>98,52%</b>
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	86.572.000,00	86.572.000,00	85.288.000,00	98,52%
	Job Fair / Bursa Kerja	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan ) di Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>68.963.000,00</b>	<b>123.099.000,00</b>	<b>78.263.260,00</b>	<b>63,58%</b>
	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	68.963.000,00	123.099.000,00	78.263.260,00	63,58%
<b>13</b>	<b>Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>76.274.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	76.274.000,00	0	0	0%
<b>V</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>248.121.000,00</b>	<b>258.721.000,00</b>	<b>248.482.000,00</b>	<b>96,04%</b>
<b>14</b>	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>160.106.000,00</b>	<b>169.706.000,00</b>	<b>160.252.000,00</b>	<b>94,43%</b>
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	160.106.000,00	169.706.000,00	160.252.000,00	94,43%
<b>15</b>	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>89.015.000,00</b>	<b>89.015.000,00</b>	<b>88.230.000,00</b>	<b>99,12%</b>
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	89.015.000,00	89.015.000,00	88.230.000,00	99,12%
<b>Jumlah</b>		<b>27.680.001.400,00</b>	<b>30.212.435.825,00</b>	<b>29.286.167.464,00</b>	<b>96,93%</b>

## Bab IV

# PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Batam tahun 2021 – 2026, yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan pada tahun 2023.

Hasil laporan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis 5 sasaran, terdapat 10 indikator yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2023, 9 (sembilan) indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 90% dari total indikator. Sementara itu sebanyak 1 (satu) indikator atau sebesar 10% belum memenuhi target. Tidak tercapainya target disebabkan oleh adanya rasionalisasi anggaran tahun 2023, sehingga terjadinya perubahan struktur belanja pada APBD perubahan 2023.

Capaian tertinggi terdapat pada indikator *Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi* dengan persentase 154.64%. Sementara indikator yang mengalami capaian terendah adalah indikator *Persentase Lembaga yang terakreditasi* yaitu 0%, hal ini dimana adanya rasionalisasi anggaran pada APBDP tahun 2023.

2. Sasaran yang tercapai tahun 2023 yaitu menurunkan tingkat pengangguran terbuka dengan target sebesar 9,75%, pada tahun 2023 ini capaiannya yaitu sebesar 8,14% tercapai dengan sangat baik. Hal ini menjadi kekuatan bagi Dinas Tenaga Kerja untuk meningkatkan kinerjanya agar sasaran strategis dari Indikator Kinerja Utama yaitu menurunnya masalah ketenagakerjaan dan berkurangnya jumlah pengangguran di Kota Batam tercapai.

## **4.2 Rekomendasi**

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam di tahun mendatang harus ditempuh berbagai upaya strategis guna mengantisipasi kendala atau hambatan yang dapat berpengaruh terhadap nilai indikator kinerja. Upaya strategis pemecahan masalah tersebut adalah:

- 1) Perlu dukungan sumber daya manusia, data dan informasi serta anggaran yang memadai agar program dan kegiatan yang dibuat benar-benar mencapai sasaran yang diinginkan sesuai dengan Visi dan Misi yang sudah dituangkan di dalam Renstra.
- 2) Mendukung pelaksanaan kegiatan yang berpusat pada Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja yaitu menurunnya masalah ketenagakerjaan dan berkurangnya jumlah pengangguran dengan cara mempertahankan indikator yang sudah tercapai baik, meningkatkan indikator yang masih cukup, dan memperhatikan prioritas program dan kegiatan yang bisa mendukung perluasan kesempatan kerja, terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatnya produktivitas tenaga kerja, meningkatnya kenyamanan berusaha serta perbaikan iklim investasi.
- 3) Meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan secara terpadu sehingga dapat menghasilkan manfaat / dampak yang lebih optimal, tepat sasaran dan tepat waktu sesuai dengan tujuan Instansi.
- 4) Melakukan evaluasi secara rutin terhadap kegiatan yang sedang dilakukan sehingga keberhasilan capaian indikator kinerja di tahun-tahun berikutnya dapat ditingkatkan sebagai upaya merealisasikan Visi dan Misi Pemerintah Kota Batam, khususnya di lingkup Ketenagakerjaan.